

## PENGUATAN TATA KELOLA YAYASAN MELALUI EVALUASI DOKUMEN KELEMBAGAAN DALAM Mendukung IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Retna Sari<sup>1\*</sup>, Erna Hernawati<sup>2</sup>, Queeny Dyah Ayu Nurfalalah<sup>3</sup>, Harry Z. Soeratin<sup>4</sup>,  
Shafira Zahra Wirawan<sup>5</sup>, Husnah Nur Laela Ermaya<sup>6</sup>, Zaskia Hanifah<sup>7</sup>,  
Iwan Kresna Setiadi<sup>8</sup>, Shafwat Abdul Hayi Syuaib<sup>9</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia  
[retnasari@upnvj.ac.id](mailto:retnasari@upnvj.ac.id)

### ABSTRAK

**Abstrak:** Permasalahan tata kelola di Yayasan Panti Nugraha meliputi belum tersusunnya *Annual Report*, ketidaklengkapan dokumen kelembagaan, serta laporan keuangan yang masih sederhana. Pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola yayasan sesuai *Good Corporate Governance* melalui penyusunan laporan tahunan dan standarisasi dokumen. Program yang dilaksanakan berupa sosialisasi, *workshop*, dan pendampingan partisipatif kepada 10 pengurus YPN, disertai advokasi dokumen dan FGD lintas unit yayasan. Evaluasi dilakukan melalui observasi dan *checklist* kelengkapan dokumen pada April dan Agustus 2025. Hasil menunjukkan peningkatan kelengkapan dokumen yayasan 50%, tersusunnya dokumen tata kelola yang berdampak pada penguatan administrasi, transparansi, akuntabilitas, serta arah pengembangan yayasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance*; Tata Kelola Yayasan; Penguatan Kelembagaan; Akuntabilitas Yayasan.

**Abstract:** *Yayasan Panti Nugraha faced several governance challenges, including the lack of Annual Report & institutional documentation, and limited financial reporting practices. This program aimed to strengthen the foundation's governance system in accordance with Good Corporate Governance by developing a standardized Annual Report and improving internal documentation. The program was implemented through socialization sessions, workshops, and participatory capacity-building activities involving 10 board members. The program including document review, focused group discussions, and assistance in preparing reporting templates. Evaluation was conducted by observation and a document completeness checklist administered in April and August 2025. The results demonstrate a 50% increase in the completeness of the foundation's documents, as well as the development of governance documents, which have strengthened administrative systems, transparency, accountability, and provided a more structured and sustainable direction for the foundation's development.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance; Nonprofit Governance; Institutional Strengthening; Foundation Accountability.*



#### Article History:

Received: 13-02-2026  
Revised : 03-03-2026  
Accepted: 04-03-2026  
Online : 01-04-2026



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Organisasi nirlaba dan yayasan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan kemanusiaan. Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba semakin meningkat seiring dengan meningkatnya partisipasi publik dalam pendanaan kegiatan sosial (Pramudya, 2025). Temuan Farwell et al. (2018) mengindikasikan bahwa persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor determinan dalam membentuk kepercayaan publik terhadap organisasi nirlaba. Tinjauan literatur Nurhuda & Sari (2025) juga menegaskan bahwa keterbatasan dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan mencerminkan lemahnya implementasi transparansi dan akuntabilitas, yang berisiko memengaruhi dukungan dari *stakeholder* yang kemudian dapat menghambat keberlanjutan organisasi nirlaba.

Secara nasional, penerapan tata kelola pada organisasi nirlaba masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik pelaporan organisasi non-profit masih relatif lemah dan belum sepenuhnya mengikuti pedoman tata kelola yang terstruktur (Roslan et al., 2017). Penelitian Ortega-Rodriguez et al. (2020) menunjukkan bahwa banyak lembaga belum memiliki standar pelaporan yang komprehensif, khususnya dalam penyajian informasi non-keuangan kepada publik. Selain itu, Nurdiani et al. (2025) menekankan bahwa akuntabilitas yang efektif tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga pelaporan kinerja program dan tata kelola organisasi.

Banyak organisasi nirlaba masih menyusun laporan keuangan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, sehingga kualitas transparansi yang dihasilkan masih terbatas (Prihatminingtyas et al., 2021). Kingston et al. (2020) juga menegaskan bahwa akuntabilitas dalam organisasi nirlaba sering kali lebih diarahkan kepada pihak yang memiliki kontrol pendanaan, sehingga penting untuk memperluas orientasi tersebut dengan memasukkan pertanggungjawaban kepada penerima manfaat sebagai bagian integral dari tata kelola yang berkeadilan.

Yayasan Panti Nugraha (YPN) sebagai mitra dalam kegiatan ini memiliki permasalahan serupa, yaitu belum tersusunnya dokumen laporan tahunan yayasan (*annual report*), keterlambatan penyusunan laporan audit independen, serta belum terintegrasinya sistem pengarsipan digital kelembagaan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat penyampaian informasi kinerja organisasi kepada donatur dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan kepada yayasan.

Ketidaksesuaian standar pelaporan dan lemahnya dokumentasi akuntansi dapat berdampak langsung pada rendahnya kualitas akuntabilitas lembaga (Gultom, 2004). Penelitian Amarta & Hamzani (2024) menunjukkan bahwa kepercayaan donatur terhadap organisasi non-profit

ditentukan oleh kualitas dan keterbukaan pelaporan, yang tidak hanya mencakup aspek finansial tetapi juga pelaksanaan program dan penggunaan dana secara menyeluruh. Pelaporan yang komprehensif tersebut menjadi instrumen penting dalam membangun legitimasi organisasi di mata publik. Profesionalisasi manajemen dan kemitraan strategis juga terbukti mendorong peningkatan transparansi sukarela dalam organisasi nirlaba (Sanzo-Pérez et al., 2017). Sejalan dengan itu, Zoey et al. (2024) menunjukkan bahwa tata kelola organisasi berpengaruh positif terhadap efisiensi melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebagai mekanisme utama. Selain itu, Labibah & Putra (2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi nirlaba tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala, tetapi juga melalui penyampaian laporan kegiatan, evaluasi program secara rutin, serta mekanisme diskusi terbuka dengan pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban finansial, melainkan juga mencakup pertanggungjawaban atas kinerja program dan praktik tata kelola organisasi secara menyeluruh. Xue & Niu (2019) juga menyatakan bahwa peningkatan transparansi berkorelasi positif dengan penerimaan donasi serta berperan dalam memulihkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, laporan tahunan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan administratif, tetapi sebagai mekanisme tata kelola yang mendukung kepercayaan publik dan kesinambungan organisasi.

Berdasarkan permasalahan mitra dan temuan penelitian terdahulu tersebut, tim *UPNVJ Community Territory* (UCT) menawarkan solusi berupa program pendampingan penyusunan dokumen laporan tahunan Yayasan Panti Nugraha sesuai prinsip GCG. Kegiatan ini dilakukan melalui *workshop* dan pendampingan secara langsung untuk membantu pengurus yayasan menyusun struktur laporan tahunan, merumuskan pelaporan kinerja program, serta mengembangkan sistem pengarsipan dokumen kelembagaan yang lebih tertata. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan bersifat transparan, akuntabel, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah (1) Menyusun dokumen laporan tahunan Yayasan Panti Nugraha yang sistematis dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, (2) Meningkatkan kapasitas pengurus dalam menerapkan GCG dalam pengelolaan dokumen kelembagaan, serta (3) Memperkuat kredibilitas dan kepercayaan donatur terhadap yayasan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan yang lebih terstruktur sehingga mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.

## B. METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Yayasan Panti Nugraha dengan peserta kegiatan berjumlah 10 orang. Metode pelaksanaan kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai tim pengabdian. Dosen berperan sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan, sedangkan mahasiswa menjadi pelaksana teknis utama yang melakukan pengumpulan data, analisis kondisi tata kelola, penyusunan evaluasi, serta perumusan rekomendasi.

Kegiatan menggunakan pendekatan pendidikan masyarakat dan advokasi kelembagaan berbasis *participatory capacity building*, yang dinilai efektif dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan komunitas karena mampu mengintegrasikan berbagai aspek pengembangan kapasitas secara menyeluruh. Analisis awal disusun oleh tim mahasiswa, kemudian didiskusikan. Seluruh kegiatan dilaksanakan melalui tahapan pra-kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi.

### 1. Tahap Pra-Kegiatan

Tahap pra-kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pengurus Yayasan Panti Nugraha untuk mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan serta memetakan permasalahan administrasi dan tata kelola Yayasan.

### 2. Tahap Pelaksanaan

#### a. Pendidikan Masyarakat

Tahap pendidikan masyarakat diawali dengan sosialisasi mengenai konsep dan prinsip GCG serta relevansinya dalam tata kelola yayasan. Materi pelatihan meliputi lima pilar utama GCG menurut (KNKG, 2021), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kegiatan dilaksanakan secara interaktif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan unsur pembina, pengurus, pengawas, dan staf administrasi. Selanjutnya, tim melakukan pendampingan teknis berupa telaah dokumen administratif yayasan yang telah tersedia. Proses ini bersifat pembimbingan dengan meminta dan memeriksa kelengkapan dokumen seperti laporan keuangan tahunan, risalah rapat, surat keputusan, serta arsip legalitas yayasan.

#### b. Advokasi dan Pendampingan Teknis

Tahap advokasi dan pendampingan teknis dilakukan melalui advokasi kelembagaan, yaitu proses pendampingan untuk membantu YPN melakukan telaah terhadap dokumen internal yang sudah dimiliki. Kegiatan advokasi ini juga melibatkan sesi konsultasi teknis di mana tim UCT membantu pengurus mengidentifikasi kesenjangan pemahaman terhadap prinsip GCG. Selain itu, dilakukan pelatihan penggunaan alat bantu digital seperti *Google Workspace* untuk berbagi dokumen antar unit, serta *Microsoft Excel* dan *Canva Docs*

untuk penyusunan laporan LPJ dan keuangan yang rapi serta mudah dipahami.

c. **Mediasi dan Fasilitas Kelembagaan**

Tahap ketiga berfokus pada mediasi antara pengurus, pembina, dan unit sosial YPN. Tim UCT berperan sebagai fasilitator untuk membantu komunikasi lintas bagian, terutama dalam penyamaan persepsi mengenai sistem pelaporan dan pembagian tanggung jawab. Kegiatan mediasi dilakukan melalui beberapa forum koordinasi internal dan FGD.

### 3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan dua kali, berupa evaluasi tengah periode dan evaluasi akhir. Evaluasi tengah periode dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan dan pemahaman peserta terhadap materi GCG, sedangkan evaluasi akhir dilakukan untuk mengukur peningkatan kelengkapan dokumen kelembagaan dan tingkat penerapan prinsip tata kelola dalam praktik kerja yayasan. Metode pelaksanaan ini dirancang agar seluruh tahapan kegiatan saling berkesinambungan mulai dari peningkatan pemahaman melalui pendidikan masyarakat, pendampingan dokumen melalui advokasi, hingga penguatan hubungan kelembagaan melalui mediasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pra Pelaksanaan

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui koordinasi awal dan diskusi dengan pengurus pelaksanaan menggunakan pendekatan *participatory capacity building*. Pendekatan partisipatif menekankan proses iteratif melalui umpan balik berkelanjutan dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan (Simmons et al., 2015). Tim melakukan pengecekan terhadap komponen tata kelola utama meliputi struktur organisasi, proses perencanaan, mekanisme pelaksanaan program, prosedur pelaporan, serta sistem *monitoring* yang akan digunakan. Tahap ini juga dibantu dengan penggunaan *checklist* tata kelola organisasi untuk memastikan seluruh aspek krusial dapat dinilai secara komprehensif. Hasil diskusi tahap ini menunjukkan bahwa YPN belum memiliki dokumen kelembagaan yang terstruktur sebagai bentuk pelaporan non-keuangan, laporan keuangan yayasan masih disusun dalam bentuk pencatatan kas sederhana, belum tersedia risalah rapat tahunan pembina, serta dokumentasi kegiatan antar-unit belum memiliki format pelaporan yang seragam. Selain itu, sistem arsip digital telah tersedia melalui *cloud storage*, namun belum tertata secara sistematis.

## 2. Pelaksanaan

### a. Pengumpulan dan Verifikasi Dokumen

Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari tahap pra-pelaksanaan sebelumnya dijadikan sebagai bahan untuk menyusun evaluasi tata kelola dan evaluasi program yang lebih terarah. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk membantu merumuskan rancangan rencana strategis yang lebih selaras dengan visi, misi, serta prioritas program yayasan untuk tahun 2025. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam menyusun keputusan strategis organisasi sosial yang berkelanjutan, karena proses ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi untuk orientasi masa depan (Sari et al., 2024), seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 2.** Sosialisasi Rencana Penyusunan *Annual Report*

Sosialisasi ini dilaksanakan pada kunjungan kedua disertai dengan pengumpulan dokumen kelembagaan seperti akta pendirian, struktur organisasi, surat penetapan pengurus, SOP, risalah rapat, dan laporan kegiatan tahunan. Verifikasi dokumen dilakukan secara bertahap untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan prinsip tata kelola yang baik.

### b. Penyusunan dan Pemaparan *Annual Report*

Tahap selanjutnya dilaksanakan dengan pemaparan *draft Annual Report* Yayasan. Dokumen yang disusun memuat profil lembaga, visi dan misi, struktur organisasi, strategi dan rencana kerja, serta capaian yayasan. Pemaparan berlangsung interaktif dengan klarifikasi atas beberapa temuan, khususnya terkait kelengkapan dokumentasi unit pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas dibandingkan unit sosial. Diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan tindak lanjut berupa perbaikan sistem arsip digital dan penyusunan mekanisme pelaporan internal yang lebih terstruktur. Luaran utama kegiatan ini meliputi dokumen *Annual Report* Yayasan Panti Nugraha Tahun 2024 sebagai acuan penyusunan laporan tahun berikutnya.

### 3. Evaluasi

*Monitoring* dilakukan selama seluruh rangkaian pendampingan melalui observasi partisipatif, telaah dokumen sebelum dan sesudah kegiatan, serta diskusi terbuka dengan pengurus yayasan. Evaluasi difokuskan pada tiga indikator utama tata kelola, yaitu kelengkapan dokumen kelembagaan, mekanisme pertanggungjawaban internal, dan sistem dokumentasi program. *Checklist* yang telah diperbarui digunakan kembali pada tahap akhir untuk melihat perubahan capaian setiap indikator, seperti terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil Evaluasi Tata Kelola Yayasan

<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Awal</b>	<b>Kondisi Setelah Pendampingan</b>
<i>Annual Report</i>	Tidak tersedia	Dokumen tersusun lengkap
Risalah Rapat Pembina	Dokumentasi tidak konsisten	Disepakati penyusunan rutin dan konsisten
Acuan Pelaporan Antarunit	Tidak seragam	Acuan tersedia untuk setiap unit
Sistem Arsip Digital	Tidak terstruktur	Restrukturisasi dan standarisasi pengarsipan

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, terdapat peningkatan pada aspek ketersediaan dokumen dan kesadaran pengurus terhadap pentingnya sistem pelaporan yang terstandar. Meskipun belum seluruh rekomendasi terimplementasi secara penuh namun telah terbentuk komitmen kelembagaan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

### 4. Kendala dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan pendampingan, terdapat beberapa kendala yang teridentifikasi. Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- a. Penyusunan Laporan Keuangan yang Lebih Menyeluruh  
YPN masih menyusun laporan keuangan dalam bentuk sederhana dan tidak mencerminkan keuangan yayasan. Atas dasar itu, Tim UCT merekomendasikan penyusunan laporan keuangan lengkap sesuai ISAK 35 untuk entitas nirlaba, yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas finansial yayasan.
- b. Integrasi Dokumen dan Keseragaman Format Antar-Unit  
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen yayasan memuat informasi yang berulang. Dalam hal ini, Tim UCT merekomendasikan agar informasi yang bersifat umum cukup disajikan dalam satu dokumen utama, sementara dokumen lain difokuskan pada konten spesifik sesuai tujuan pelaporan. Penerapan acuan yang seragam antar unit yayasan serta penyusunan SOP pelaporan internal yang menetapkan jadwal, format, dan indikator

capaian yang mencakup jumlah penerima manfaat, kegiatan utama, dan *outcome* juga diperlukan agar laporan setiap unit dapat diintegrasikan dan diperbandingkan.

c. Digitalisasi Arsip Dokumen dan Dokumentasi Kegiatan

Kualitas dokumentasi yayasan tidak merata serta sebagian besar dokumentasi kegiatan yang tersimpan tidak memberikan konteks transparansi hasil yang dicapai. Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan agar YPN menyusun panduan dokumentasi kegiatan yang menetapkan standar minimal foto yang mencerminkan hasil nyata program dan meningkatkan kualitas dokumentasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas bukti visual untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui dokumentasi yang lebih representatif dan profesional.

d. Struktur Tata Kelola dan Mekanisme Rapat Pengurus

Hasil evaluasi terhadap dokumen kelembagaan yayasan menunjukkan bahwa struktur organ yayasan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Nomor 28 Tahun 2004, terutama terkait kejelasan fungsi pembina, pengurus, dan pengawas. Selain itu, belum terdapat bukti risalah rapat tahunan pembina dan laporan evaluasi kinerja pengurus. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada yayasan agar melakukan penetapan jadwal rapat rutin antara pengurus dan pembina dengan risalah resmi yang ditandatangani pihak terkait. Langkah ini penting untuk memperkuat akuntabilitas internal serta memastikan keputusan organisasi diambil secara kolektif.

Dengan ini, dapat ditegaskan bahwa penyusunan *annual report* tidak hanya menghasilkan dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen awal pembentukan sistem tata kelola pada organisasi nirlaba. Dalam perspektif *Good Corporate Governance*, organisasi perlu membangun mekanisme yang memungkinkan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan dapat diverifikasi (KNKG, 2021). Sejalan dengan Yuliarti & Martini (2025), akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan kualitas tata kelola.

**Tabel 2.** Kelengkapan Dokumen Yayasan

Indikator	Jumlah Dokumen Awal	Jumlah Dokumen Setelah Pendampingan
Profil Yayasan	2	3
Kegiatan dan Capaian Program	2	4
Laporan Keuangan	2	3
Tata Kelola Yayasan	0	1
Rencana Strategis	0	1

Peningkatan dokumen pada masing-masing indikator membawa implikasi yang signifikan terhadap penguatan kelembagaan yayasan. Kenaikan aspek dokumen Profil Yayasan sebesar 50% memperjelas identitas, legalitas, dan informasi dasar lembaga sehingga meningkatkan kredibilitas serta mempermudah kerja sama dengan mitra dan donor. Peningkatan Kegiatan dan Capaian Program sebesar 100% menunjukkan penguatan pelaporan kinerja, yang berdampak pada meningkatnya akuntabilitas dan kemampuan yayasan dalam menunjukkan dampak program secara terukur. Sementara itu, kenaikan Laporan Keuangan sebesar 50% memperbaiki transparansi dan ketertiban administrasi finansial, sehingga menumbuhkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Adanya dokumen Tata Kelola Yayasan dan Rencana Strategis juga menandakan terbentuknya sistem pengelolaan dan arah pengembangan yang lebih jelas, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang terstruktur serta keberlanjutan program di masa mendatang.

Sejalan dengan Nurdiani et al. (2025) yang menjelaskan bahwa penerapan transparansi keuangan dalam organisasi non-profit dapat mendorong perubahan perilaku organisasi menuju budaya akuntabilitas. Perubahan tersebut di YPN tercermin dari penataan dokumen antar-unit serta penyepakatan format pelaporan yang lebih seragam. Temuan ini juga diperkuat oleh Tanjaya et al. (2024) yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan kejelasan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya menjadi faktor penting dalam menjaga relasi kepercayaan antara lembaga dan publik.

Penelitian Elmagrhi & Ntim (2023) juga menekankan bahwa pengukuran kinerja organisasi nirlaba tidak hanya berbasis indikator keuangan, tetapi juga pada dampak sosial yang dihasilkan. Hal ini relevan dengan penyusunan *Annual Report* YPN yang tidak hanya memuat laporan keuangan, tetapi juga capaian program, jumlah penerima manfaat, serta gambaran keberlanjutan kegiatan. Sesuai dengan penelitian Putra et al. (2024), pelaporan tahunan dapat diposisikan sebagai media komunikasi strategis yang memperkuat legitimasi organisasi di mata pemangku kepentingan melalui pengungkapan informasi yang terstruktur dan konsisten.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak semata menghasilkan luaran berupa dokumen, tetapi turut membentuk fondasi tata kelola yang lebih sistematis. Ke depannya, penguatan melalui audit independen serta publikasi laporan secara daring dapat memperluas dimensi transparansi. Langkah tersebut penting agar praktik tata kelola yang telah dibangun tidak berhenti pada level internal, melainkan berkembang menjadi mekanisme pertanggungjawaban publik yang berkelanjutan.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan kelembagaan Yayasan Panti Nugraha (YPN) telah dilakukan dengan melewati tahap penyuluhan & pelatihan, advokasi kelembagaan, mediasi antarpengurus YPN, serta penyampaian produk berupa buku *Annual Report* dan evaluasi langsung terhadap penerapan tata kelola YPN sebanyak 4 poin evaluasi utama sebagai *benchmark* perbaikan YPN di *financial year* 2026. Poin evaluasi yang disampaikan mencakup perbaikan mengenai penyusunan laporan keuangan yang lebih menyeluruh dan menggambarkan keuangan yayasan, integrasi dokumen serta penyeragaman format dokumen antarunit, digitalisasi arsip serta dokumentasi yayasan, dan penegasan struktur serta alur tata kelola yayasan.

Atas kegiatan pendampingan ini, hasil menunjukkan adanya peningkatan kelengkapan dokumen yayasan secara signifikan. Profil Yayasan dan Laporan Keuangan meningkat 50%, Kegiatan dan Capaian Program meningkat 100%, serta tersusunnya dokumen Tata Kelola dan Rencana Strategis yang sebelumnya belum tersedia. Peningkatan ini berdampak pada penguatan administrasi, transparansi, akuntabilitas, serta arah pengembangan yayasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Bagi penelitian selanjutnya, dapat dilakukan observasi dan perbaikan yang lebih mendalam termasuk legalitas hukum dan alur kerja yayasan yang dapat meningkatkan fungsi verifikasi antar fungsi. Selain itu, penguatan kelembagaan juga dapat dipertegas melalui struktur dan standar operasional yayasan sehingga tata kelola yayasan tidak hanya berpaku pada pengarsipan dan dokumentasi.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Yayasan Panti Nugraha atas kerja sama, keterbukaan, serta partisipasi aktif yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan optimal terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi selama pengabdian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim UPNVJ Community Territory (UCT) serta tim mahasiswa atas dukungan dan kontribusinya selama pelaksanaan kegiatan. Rasa syukur juga turut kami ucapkan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta atas dukungan institusional yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Amartha, P., & Hamzani, U. (2024). Donor Perspectives on Accountability and Transparency of Nonprofit Financial Reporting. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(5), 2055–2062. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i5.2532>
- Elmagrhi, M. H., & Ntim, C. G. (2023). Non-financial Reporting in Non-profit Organisations: The Case of Risk and Governance Disclosures in UK Higher Education Institutions. *Accounting Forum*, 47(2), 223–248. <https://doi.org/10.1080/01559982.2022.2148854>

- Farwell, M. M., Shier, M. L., & Handy, F. (2018). Explaining trust in Canadian charities: The influence of public perceptions of accountability, transparency, familiarity and institutional trust. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 30(4), 768-782. <https://doi.org/10.1007/s11266-018-00046-8>
- Gultom, Ignasius Rian Poputra, A. T. (2004). Analisis Penerapan Psak No.45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Dalam Mencapai Transparansi Dan Akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 3(45), 1-19.
- Kingston, K. L., Furneaux, C., Zwaan, L. De, & Alderman, L. (2020). From monologic to dialogic on beneficiaries' terms. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(2), 447-471. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2019-3847>
- KNKG. (2021). Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021. *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 37.
- Labibah, A. F., & Putra, R. (2025). Keterbukaan, Transparansi, Dan Aksesibilitas Dana Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Yayasan Bani Chozin El Kafa Pasuruan). *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 16(12), 1-10.
- Nurdiani, T., Rahmawati, D., Pogo, T., & Bakar, N. R. B. A. (2025). Financial Transparency and Accountability in Nonprofit Organizations: A Systematic Literature Review. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 4(2), 166-180. <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i2.102>
- Nurhuda, & Sari, P. Y. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Kegiatan dan Laporan Keuangan di Perkumpulan Ruang Belajar Aqil. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 6(1), 75-85.
- Ortega-Rodríguez, C., Licerán-Gutiérrez, A., & Moreno-Albarracín, A. L. (2020). Transparency as a key element in accountability in non-profit organizations: A systematic literature review. *Sustainability*, 12(14), 5834. <https://doi.org/10.3390/su1214583>
- Pramudya, W. H. (2025). Church Governance : A Systematic Literature Review Tata Kelola Gereja : Sebuah Tinjauan Sistematis Literatur. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 4(2), 871-888. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.260>
- Prihatmingtyas, B., Fatima, W. Q., & Khairunisa, L. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Panti Asuhan Al-Maun Desa Ngajum Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1), 37-44.
- Putra, T. S., Akbar, B., Suwarno, Friska, R., Rengasamy, D., & Noorjahan, M. (2024). Transparency in Ensuring Governance and Accountability of Non-Profit Institutions: Lessons from Malaysia and India. *Lex Publica*, 11(1), 118-138. <https://doi.org/10.58829/lp.11.1.2024.258>
- Roslan, N., Arshad, R., & Pauzi, N. F. M. (2017). Accountability And Governance Reporting By Non-Profit Organizations. *SHS Web of Conferences*, 36(00041), 1-15.
- Sanzo-Pérez, M. J., Rey-García, M., & Álvarez-González, L. I. (2017). The Drivers of Voluntary Transparency in Nonprofits: Professionalization and Partnerships with Firms as Determinants. *International Society For Third-Sector Research*, 28, 1595-1621. <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9882-9>
- Sari, R. Y., Rusdinal, & Anisah. (2024). Analisis Swot Sebagai Alat Penting Dalam Proses Perencanaan Strategis. *Jurnal Niara*, 17(1), 87-97.
- Simmons, V. N., Klasko, L. B., Fleming, K., Koskan, A. M., Jackson, N. T., Noel-Thomas, S., Luque, Jo. S., Susan T, V., Lee, J.-H., Quinn, G. P., Britt, L., Waddell, R., Meade, C. D., Gwede, C. K., & Tampa Bay Community Cancer Network Community Partners. (2015). Participatory Evaluation of A Community - Academic Partnership to Inform Capacity-Building and Sustainability. *Evaluation and Program Planning*, 52, 19-26.

- <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2015.03.005>
- Tanjaya, H. N., Umyana, A., & Espa, V. (2024). Pandangan Donatur Mengenai Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Nirlaba. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *19*(2), 733–743.
- Xue, Q., & Niu, Y. (2019). Governance and transparency of the Chinese charity foundations. *Asian Review of Accounting*, *27*(2), 307–327. <https://doi.org/10.1108/ARA-03-2018-0057>
- Yuliarti, N. C., & Martini, N. N. P. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Pelaporan Keuangan Panti Asuhan Budi Mulya dalam Perspektif PSAK 45. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, *10*(2), 18–32.
- Zoey, Z. L., Zhang, Y., & Williamson, A. (2024). Governance and efficiency in Chinese foundations. *Financial Accountability & Management*, *40*, 520–548. <https://doi.org/10.1111/faam.12390>